



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

TAHUN ANGGARAN 2025

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

Tahun 2024





BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun yang disusun dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor wajib menyusun RKPD Tahun 2025 yang digunakan sebagai pedoman untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang.....

32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 6);
36. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Biak Numfor.
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Biak Numfor, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Biak Numfor.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

6. Rencana Pembangunan.....

- c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - g. BAB VII Penutup
- (2). Penjabaran program RPJMD/RPD ke dalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan Format Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 6

- (1). Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyusunan:
 - a. RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025; dan
- (2). Penyusunan RKPD Kabupaten Biak Numfor sebagai penjabaran dari RPD 2024-2026, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025;
 - c. penyusunan rancangan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025;
 - d. pelaksanaan musyawarah RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025; dan
 - f. penetapan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025.
- (3). Penyusunan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4). Penyusunan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.
- (5). Penyusunan RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pencapaian Nasional dan arah kebijakan Pemerintah.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua**Tujuan****Pasal 7**

Penetapan RKPD bertujuan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Biak Numfor

BAB IV**PENUTUP****Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 18 Juli 2024

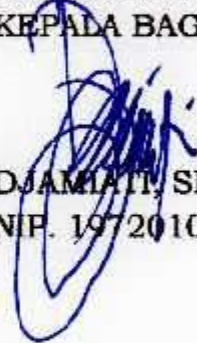
Pj. BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
SOFIA BONSAPIA

Diundangkan di Biak
Pada tanggal, 18 Juli 2024

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS LEORNALD MAILOA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DJAMLATI, SH
NIP. 19720106 200502 2 005



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat merampungkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 ini. Sebagaimana peraturan yang berlaku, dokumen RKPD Tahun 2025 ini tetap memedomani Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024- 2026, dokumen RKP, program-program prioritas dan strategis nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen RKPD Tahun 2025 merupakan tahun kedua RPD Tahun 2024-2026 yang penyusunannya didasari oleh isu-isu strategis yang mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat. Dengan telah selesainya penyusunan RKPD Tahun 2025 ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, baik unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor, dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen RKPD ini.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa dapat memberikan kekuatan bagi kita semua dalam membangun Kabupaten Biak Numfor demi mewujudkan tema pembangunan Biak Numfor tahun 2025 yaitu **"Memperkuat Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Demi Terwujudnya Biak Numfor yang Mandiri dan Sejahtera"**.

Biak, 18 Juli 2024

Pj. BUPATI BIAK NUMFOR



SOFIA BONSAPIA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	9
1.4 Maksud dan Tujuan	10
1.5 Sitematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	13
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	13
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	121
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	162
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	177
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	177
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	196
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	210
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	211
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025.....	216
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAN.....	231
5.1 Rencan Kerja Perangkat Daerah	231
5.2 Penganggaran Dana Otonomi Khusus	233
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	236
BAB VII PENUTUP.....	255



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Distrik di Kabupaten Biak Numfor.....	15
Tabel 2. 2	Sumber Air di Kab. Biak Numfor.....	20
Tabel 2. 3	Luas Kedalaman Tanah di Kab. Biak Numfor.....	26
Tabel 2. 4	Karakteristik Skala Intensitas Mercalli (MMI).....	29
Tabel 2. 5	Potensi Bahaya di Kab. Biak Numfor	31
Tabel 2. 6	Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Perkotaan di Kab. Biak Numfor	34
Tabel 2. 7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023.....	35
Tabel 2. 8	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin menurut Distrik di Kab. Biak Numfor Tahun 2023	37
Tabel 2. 9	Sistem Satuan Pengembangan Wilayah	44
Tabel 2. 10	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kab. Biak Numfor.....	49
Tabel 2. 11	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku di Kab. Biak Numfor	50
Tabel 2. 12	Perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 atas dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kab. Biak Numfor.....	51
Tabel 2. 13	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2019-2023 atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kab. Biak Numfor.....	52
Tabel 2. 14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 ...	55
Tabel 2. 15	PDRB atas Harga Konstant 2010 menurut Kabupaten Biak Numfor (Juta Rupiah)	56
Tabel 2. 16	Pengeluaran Perkapita Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019- 2023.....	57
Tabel 2. 17	Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT) Kab. Biak Numfor.....	65
Tabel 2. 18	Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita Kab. Biak Numfor ..	66



Tabel 2. 19 Rasio Penduduk yang mendapatkan Air Bersih yang disalurkan oleh PT. WAR Bersendi Tahun 2019-2023	68
Tabel 2. 20 Rasio Penduduk yang mendapat Akses Listrik oleh PT. PLN di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	68
Tabel 2. 21 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kab. Biak Numfor (km) Tahun 2019-2023.....	70
Tabel 2. 22 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkandan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023	73
Tabel 2. 23 Angka Partisipasi Kasar (APK) per Jenjang Pendidikan di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	75
Tabel 2. 24 Angka Partisipasi Murni (APM) per Jenjang Pendidikan di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	76
Tabel 2. 25 Jumlah dan Rasio Guru dan Murid per Jenjang Pendidikan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	77
Tabel 2. 26 Jumlah Siswa/ Murid Putus Sekolah Tahun 2021-2023	78
Tabel 2. 27 Dukungan Pemerintah bagi OAP dalam Bidang Pendidikan Kab. Biak Numfor	79
Tabel 2. 28 Angka Kejadian Malaria Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	81
Tabel 2. 29 Prevalensi HIV Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	83
Tabel 2. 30 Jumlah Prasarana Kesehatan (unit) di Kabupaten Biak Numfor	83
Tabel 2. 31 Capaian Pelayanan SPAM Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	87
Tabel 2. 32 Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	90
Tabel 2. 33 Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2023.....	91
Tabel 2. 34 Capaian SPM Bidang TRANTIBUMLINMAS Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	94
Tabel 2. 35 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	98
Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	102



Tabel 2. 37	Capaian Indikator Bidang Urusan Perhubungan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	107
Tabel 2. 38	Indikator Capaian Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2022	110
Tabel 2. 39	Capaian Indikator Urusan Statistik	111
Tabel 2. 40	Capaian Indikator Urusan Kebudayaan Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2022	112
Tabel 2. 41	Angka Konsumsi Ikan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	117
Tabel 2. 42	PAD Sektor Pariwisata Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	118
Tabel 2. 43	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Biak Numfor	122
Tabel 2. 44	Identifikasi dan Pemetaan Masalah	164
Tabel 3. 1	Proyeksi Ekonomi Global	179
Tabel 3. 2	Realisasi Investasi	181
Tabel 3. 3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	184
Tabel 3. 4	PDRB Atas Dasar Harga Konstant 2010 menurut Pengeluaran Kab. Biak Numfor.....	185
Tabel 3. 5	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	185
Tabel 3. 6	Perkembangan PRDB Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	186
Tabel 3. 7	Garis Kemiskinan Kab. Biak Numfor per Maret 2021-Maret 2023 (Rp/ Kapita/ Bulan)	192
Tabel 3. 8	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Biak Numfor (Maret 2021-Maret 2023)	193
Tabel 3. 9	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kab. Biak Numfor Tahun 2022- 2026	199
Tabel 3. 10	Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2022-2026.....	203
Tabel 3. 11	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2022-2026.....	206
Tabel 3. 12	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025	207



Tabel 3. 13 Kerangka Pengalokasian Sumber Dana OTSUS Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025	208
Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2025	214
Tabel 4. 2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Biak Numfor Tahun 2025	220
Tabel 4. 3 Keterkaitan Tema dan Prioritan Pembangunan Nasional, Provinsi Papua, dan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025	222
Tabel 4. 4 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	224
Tabel 5. 1 Rekapitulasi Anggaran Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2025	231
Tabel 5. 2 Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kab. Biak Numfor Tahun 2025	234
Tabel 6. 1 Indikator Makro Pembangunan/ Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	236
Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Kunci	237
Tabel 6. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kab. Biak Numfor	238

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota	4
Gambar 1. 2 Hubungan RKPD Kab. Biak Numfor dengan Dokumen Lainnya....	10
Gambar 1. 3 Peta Administrasi Kab. Biak Numfor	14
Gambar 2. 1 Peta Morfologi Wilayah Kab. Biak Numfor	17
Gambar 2. 2 Peta Kelerengan Wilayah Kabupaten Biak Numfor	18
Gambar 2. 3 Peta Kontur Pulau Biak dan Sekitarnya	18
Gambar 2. 4 Peta Klimatologi Kabupaten Biak Numfor dan Sekitarnya	19
Gambar 2. 5 Peta Wilayah Air	20
Gambar 2. 6 Peta Hidrologi Kab. Biak Numfor	21
Gambar 2. 7 Peta Geologi Pulau Biak dan Sekitarnya	25
Gambar 2. 8 Peta Jenis Tanah di Kab. Biak Numfor.....	27
Gambar 2. 9 Peta Zona Gempa Kab. Biak Numfor dan Sekitarnya.....	29
Gambar 2. 10 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/ Kota Provinsi Papua dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023	32
Gambar 2. 11 Peta Sumber Daya Mineral	33
Gambar 2. 12 Jumlah OAP dan Non OAP Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2023	36
Gambar 2. 13 Peta Pembagian SSWP.....	44
Gambar 2. 14 Peta Struktur Ruang Wilayah Kab. Biak Numfor.....	47
Gambar 2. 15 Tingkat Inflasi Provinsi Papua April 2023-April 2024.....	53
Gambar 2. 16 Andil Inflasi Kelompok Pengeluaran (y-on-y)	53
Gambar 2. 17 Indeks Perkembangan Harga pada Kab. Biak Numfor	54
Gambar 2. 18 Komoditas Penyumbang Utama Perkembangan Harga	54
Gambar 2. 19 Rasio Gini Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	58
Gambar 2. 20 Persentase Penduduk Miskin Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	59
Gambar 2. 21 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	59
Gambar 2. 22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	60
Gambar 2. 23 IPM Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	61
Gambar 2. 24 Usia Harapan Hidup Tahun 2019-2023 Kab. Biak Numfor.....	62
Gambar 2. 25 Angka Melek Huruf Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	63



Gambar 2. 26 Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023...	63
Gambar 2. 27 Harapan Lama Sekolah Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	64
Gambar 2. 28 Kontribusi Net Ekspor (Ekspor-Impor) terhadap PDB Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 berdasarkan ADHB dan ADHK (persen).....	67
Gambar 2. 29 Indeks Kemahalan Konstruksi Kab. Biak Numfor Tahun 2021-2023.....	69
Gambar 2. 30 Rekapitulasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal di Pelabuhan Biak Tahun 2023	71
Gambar 2. 31 Lama Proses Pengurusan Perizinan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	72
Gambar 2. 32 Data Jumlah Investor Berskala Nasional Kab. Biak Numfor Tahun 2021-2023.....	73
Gambar 2. 33 Perbandingan APK dan APM per Jenjang Pendidikan di Kab.Biak Numfor Tahun 2019-2023	77
Gambar 2. 34 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup tahun 2019- 2023 di Kab. Biak Numfor	80
Gambar 2. 35 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	81
Gambar 2. 36 Prevalensi Stunting Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	82
Gambar 2. 37 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	84
Gambar 2. 38 Cakupan Puskesmas/ Distrik Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	84
Gambar 2. 39 Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)/ Kampung di Kab. Biak Numfor	85
Gambar 2. 40 Rasio Dokter/ Satuan Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019- 2023.....	85
Gambar 2. 41 Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	86
Gambar 2. 42 Capaian Pengelolaan SPALD-S Kab. Biak Numfor Tahun 2019- 2023.....	88
Gambar 2. 43 Rasio Jumlah Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	89



Gambar 2. 44 Jumlah IMB yang berkau Tahun 2019-2023 di Kab. Biak Numfor	89
Gambar 2. 45 Cakupan Rumah Layak Huni Terbangun Tahun 2019-2023 Kab. Biak Numfor	92
Gambar 2. 46 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	93
Gambar 2. 47 Indikator Pelayanan PPKS Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.	95
Gambar 2. 48 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lansia Terlantar di Luar Panti skala Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	96
Gambar 2. 49 Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2022	97
Gambar 2. 50 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	100
Gambar 2. 51 Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Selesai Tepat Waktu Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	100
Gambar 2. 52 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	101
Gambar 2. 53 Rasio Penduduk Ber-KTP, Rasio Bayi Berkate Kelahiran, dan Rasio Pasangan Berakte Nikah Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	103
Gambar 2. 54 Kampung yang memiliki BUMDes/ BUMkam Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	105
Gambar 2. 55 Total Fertility Rate (TFR) Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 ..	106
Gambar 2. 56 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	107
Gambar 2. 57 Jumlah Koperasi Aktif Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	108
Gambar 2. 58 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	109
Gambar 2. 59 Data Jumlah Investor Berskala Nasional Kab. Biak Numfor Tahun 2021-2023.....	109
Gambar 2. 60 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	115



Gambar 2. 61 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	115
Gambar 2. 62 Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023	116
Gambar 2. 63 Total Kunjungan Wisatawan Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2022	117
Gambar 2. 64 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	119
Gambar 2. 65 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	119
Gambar 2. 66 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kab. Biak Numfor Tahun 2020-2023.....	120
Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II.....	180
Gambar 3. 2 Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Triwulan II Tahun 2023	181
Gambar 3. 3 Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha (y-o-y)	187
Gambar 3. 4 Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha.....	188
Gambar 3. 5 Distribusi PDRB menurut Pengeluaran.....	189
Gambar 3. 6 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran	190
Gambar 3. 7 Persentase Penduduk Miskin Kab. Biak Numfor Tahun 2014-2023.....	191
Gambar 3. 8 IPM Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023.....	193
Gambar 3. 9 Distribusi Tenaga Kerja di Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023 ..	195
Gambar 4. 1 Sasaran Pembangunan Nasional	211

BAB I

PENDAHULUAN

"Menggambarkan Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025."





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada masa transisi dalam rangka menerapkan agenda Nasional yaitu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD, dan DPD serta penyelenggaraan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak, maka penyusunan dokumen perencanaan secara nasional diatur dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru. Amanat undang-undang tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Arah pembangunan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, dimana pembangunan daerah di arahkan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Tahun 2025 merupakan tahapan kedua dari proses pelaksanaan RPD dimana ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Biak Numfor terhadap pencapaian pembangunan Nasional. Pada tahapan ini, fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kabupaten Biak Numfor sebagai kota yang mandiri.



RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain dari pada itu, RKPD Tahun 2025 juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPD serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor adalah merupakan dokumen operasional dari dokumen RPD yang di jabarkan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2025 sesuai dengan arah kebijakan Nasional dalam menentukan anggaran, kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan *money follow function*, tetapi *money follow program prioritas*. Tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata. Anggaran harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.



Tahap selanjutnya adalah verifikasi dan integrasi program dan kegiatan prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap Perangkat Daerah, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja Perangkat Daerah terkait.

Tersusunnya RKPD Kabupaten Biak Numfor ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pencapaian target-target pembangunan pada Tahun 2025 melalui pendekatan *Common Goals* serta kewilayahan dengan melakukan evaluasi tahun sebelum serta penetapan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Proses perumusan RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun



- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6730);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6731);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata



- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penemrimaan dalam Rangka Otonomi Khusus;
 29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 32. Instruksi Menteri Dalan Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

"Berisi Gambaran Umum Kondisi Daerah yang mengemukakan tentang Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Permasalahan Pembangunan Daerah."



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan bagi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah. Analisis lebih lanjut masing-masing aspek dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

Analisis aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi dan pengembangan wilayah, serta kerentanan wilayah terhadap bencana. Sementara itu, aspek demografi meliputi perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1.1 Karakteristik dan Kondisi Wilayah

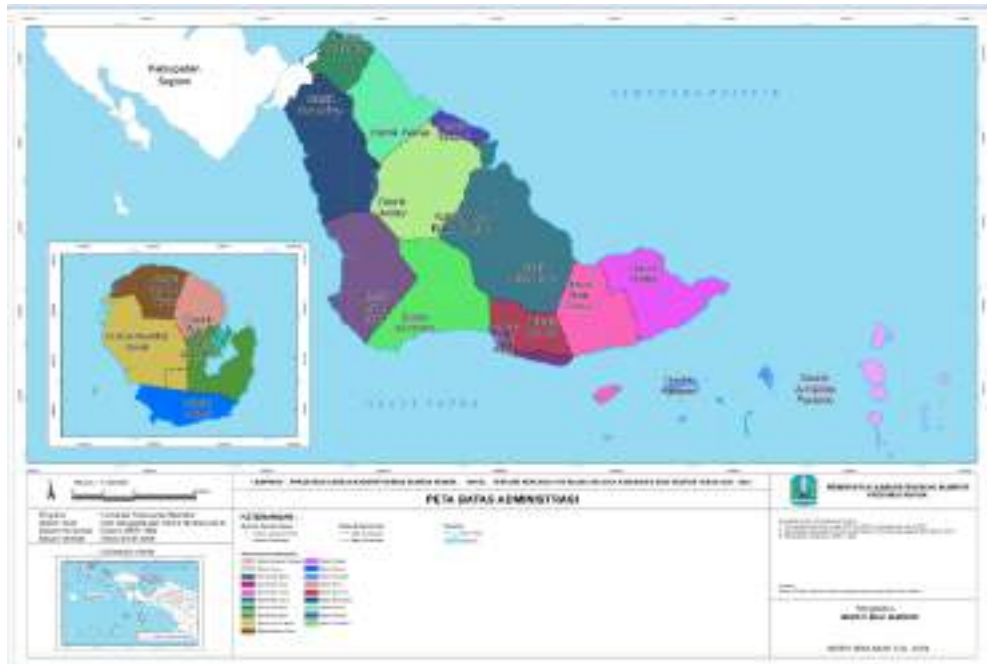
Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Biak Numfor dapat ditinjau dari beberapa aspek yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Biak Numfor terletak di sebelah utara daratan Papua, tepatnya di Teluk Cendrawasih. Secara geografis terletak pada 0° 55'–1° 27' Lintang Selatan dan 134° 47'–136° Bujur Timur. Kabupaten ini terdiri dari dua pulau besar, yaitu Pulau Biak dan Pulau Numfor, dan memiliki 42 pulau-pulau kecil di Kepulauan Padaido. Batas-batas wilayah Kabupaten Biak Numfor secara administratif adalah:

- *Sebelah Utara* : *Kabupaten Supiori, Samudera Pasifik*
- *Sebelah Timur* : *Samudera Pasifik*

- *Sebelah Selatan* : *Selat Yapen*
- *Sebelah Barat* : *Kabupaten Manokwari*



Gambar 1. 3
Peta Administrasi Kab. Biak Numfor
(Sumber: Draft Revisi RTRW Kab. Biak Numfor 2023-2043)

Kabupaten Biak Numfor secara administrasi berada di wilayah administrasi Provinsi Papua dan ber ibu kota di Biak. Luas Kabupaten Biak Numfor menurut hasil perhitungan peta GIS adalah 225,772.35 ha. Peta GIS yang digunakan telah mendapat persetujuan dari BIG, dengan menggunakan batas administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

Sementara jika dilihat berdasarkan luasan, Distrik Biak Utara memiliki wilayah paling luas sekitar 277,77 km², sedangkan Distrik Padaido merupakan distrik dengan wilayah paling kecil, yaitu 30,72 km². Untuk jarak tempuh, distrik dengan jarak tempuh dari ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten paling jauh adalah Distrik Swandiwe, yaitu sekitar 80 km, sedangkan jarak yang paling dekat adalah Distrik Samofa dengan jarak sekitar 2 km.

Tabel 2. 1
Luas Distrik di Kabupaten Biak Numfor

No.	Distrik	Luas (Ha)	Ibu Kota	Jumlah Kampung/ Kelurahan
1.	Numfor Barat	10,214.97	Kameri	12
2.	Numfor Timur	5,195.05	Yenburwo	9
3.	Orkeri	6,162.90	Pakreki	9
4.	Poiru	4,519.26	Andei	9
5.	Bruyadori	6,958.58	Duai	10
6.	Padaido	1,473.23	Pai	11
7.	Aimando	4,065.16	Pasi	13
8.	Oridek	16,339.43	Wadibu	14
9.	Biak Timur	15,407.98	Bosnik	26
10.	Biak Kota	2,441.79	Biak	15/7
11.	Samofa	7,809.75	Darfuar	10/7
12.	Yendidori	21,211.30	Yendidori	19
13.	Biak Utara	34,407.88	Korem	16
14.	Yawosi	2,564.16	Wasori	8
15.	Andey	23,409.30	Roidifu	11
16.	Bondifuar	6,812.02	Sansundi	5
17.	Warsa	14,250.29	Ammoy	20
18.	Biak Barat	19,710.81	Yomdori	22
19.	Swandiwe	22,818.49	Wombrisauw	15
Jumlah		225,772.35		254/14

(Sumber: PP no.43/2021; luas distrik menurut hasil hitungan peta GIS)

B. Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Biak Numfor berada di sebelah utara daratan Papua, tepatnya pada titik 0o 55' – 1o 27' Lintang Selatan dan 134o 47' – 136o Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki dua pulau besar (Pulau Biak dan Pulau Numfor) dan sekitar 42 pulau-pulau kecil. Kabupaten Biak Numfor terdiri atas 19 distrik, tersebar di 3 pulau dan kepulauan, yakni:

(2020-2023) yang menunjukkan rata-rata lama kunjungan wisatawan di Kabupaten Biak Numfor mencapai 4 hari.

Sektor pariwisata juga menjadi salah satu penyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Biak Numfor. Data terakhir tahun 2023 menunjukkan sektor pariwisata menyumbang Rp.21.829.961.403,- PAD kepada daerah. Angka ini meningkat signifikan dari tahun 2019 yang pada tahun tersebut sektor pariwisata hanya menyumbang Rp.5.854.451.894 sebagai PAD kepada daerah. Pajak sektor pariwisata didapat dari beberapa elemen sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 42
PAD Sektor Pariwisata Kab. Biak Numfor Tahun 2019-2023

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pajak Hotel dan Akomodasi (Rp)	3,704,563,443	743,399,277	1,295,863,622	15,153,657,722	15,036,319,439
2	Pajak Restoran dan Rumah Makan (Rp)	1,938,162,751	1,485,482,589	1,910,458,868	3,514,719,437	3,498,081,844
3	Pajak Hiburan (Rp)	211,725,700	270,197,095	323,777,995	2,926,415,787	3,295,560,120
Total PAD Sektor Pariwisata (Rp)		5,854,451,894	2,499,078,961	3,530,100,485	21,594,792,946	21,829,961,403

(Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Biak Numfor Tahun 2024)

C. Bidang Urusan Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari.



Tabel 2. 43

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Biak Numfor

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023)	Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
1				2	3	4		Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%	9 = 5 + 7		10=9/4 x100%	12	
					K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	0	1		PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN														
1	0	1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
1	0	1	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan bagi ASN dan tenaga honorer		98,5 6	177,880,619,4 86.00	180.478.43 6.989	10 0	177,967,887,0 72	109.2491 085	194,428,329,9 84.00	109.2 5	207.8091 085	372,308,949,47 0.00		Pendidikan dan kebudayaan
1	0	1	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan pendidikan yang siap pakai			80,000,000.00	80.000.000	10 0	406,580,000	419.7402 725	1,706,580,000 .00	419.7 4	419.7402 725	1,786,580,000.0 0		Pendidikan dan kebudayaan
1	0	1	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Fasilitas Pendidikan		99,9 8	679,721,850.0 0	679.885.35 0	10 0	448,558,500	100	448,558,500.0 0	100.0 0	199.98	1,128,280,350.0 0		Pendidikan dan kebudayaan
1	0	1	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya layanan pendidikan yang siappakai		100	152,524,375.0 0	152.524.37 5	10 0	153,347,380	100	153,347,380.0 0	100.0 0	200	305,871,755.00		Pendidikan dan kebudayaan
1	0	1	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terlaksananya layanan pendidikan yang siap pakai		100	20,000,000.00	20.000.000	10 0	20,013,450	100	20,013,450.00	100.0 0	200	40,013,450.00		Pendidikan dan kebudayaan
1	0	1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tersedianya sarana dan prasarana serta anggaran dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas untuk peningkatan mutu pendidikanSekolah Dasar													
1	0	1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya layananpendidikan yang siap pakai		43,9 1	29,259,115,23 7.00	66.629.403. 301	10 0	64,180,365,70 0	56.09229 535	36,000,240,28 4.00	56.09	100.0022 953	65,259,355,521. 00		Pendidikan dan kebudayaan
1	0	1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya layanan pendidikan yang siap pakai		52,7 2	31,167,828,58 1.00	59.118.082. 295	10 0	42,160,884,85 0	15.14951 565	6,387,169,850 .00	15.15	67.86951 565	37,554,998,431. 00		Pendidikan dan kebudayaan
1	0	1	0	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya layanan pendidikan yang siap pakai	12,211,000,00 0.00	65,2 5	3,696,567,635. 00	5.664.898.0 00	10 0	6,160,283,000	54.28013 616	3,343,810,000 .00	54.28	119.5301 362	7,040,377,635.0 0	57.66	Pendidikan dan kebudayaan
1	0	1	0	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Terlaksananya layanan pendidikan yang siap pakai	5,310,000,000 .00	18,5 4	276,021,000.0 0	1.488.611.0 00	10 0	1,162,290,000	100	1,162,290,000 .00	100.0 0	118.54	1,438,311,000.0 0	27.09	Pendidikan dan kebudayaan
1	0	1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (OTSUS)	Terpenuhi layanan pendidikan bermutu dan berkualitas	5,178,000,000 .00	88,5 9	10,015,353,90 5.00	11.305.342. 000	10 0	19,438,842,00 0	44.41888 822	8,634,517,500 .00	44.42	133.0088 882	18,649,871,405. 00	360.18	Pendidikan dan kebudayaan
1	0	1	0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Terpenuhi layanan pendidikan bermutu dan berkualitas		92,9 6	7,366,822,982. 00	7.924.407.0 00	10 0	8,074,407,000	33.54794 982	2,708,798,009 .00	33.55	126.5079 498	10,075,620,991. 00		Pendidikan dan kebudayaan



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2023)	Anggaran Setelah Perubahan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
1					2	3	4		5	Rp	6		7		8 = 7/6 x 100%	9 = 5 + 7		10=9/4 x100%	12
						K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	0	0	2.0	PENANGANAN KONFLIK SOSIAL															
	1	6		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Sejumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		225,000,000.0	33,3	100,000,000.0	300,000.00	100	700,000,000.0	28.57142857	200,000,000.0	28.57	61.90142857	300,000,000.00	133.33	KESBANGPOL

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

*"Membahas tentang Rancangan Kerangka
Ekonomi Daerah yang mengemukakan tentang
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah
Kebijakan Keuangan Daerah."*



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini akan membahas tentang kondisi ekonomi Kabupaten Biak Numfor tahun 2023 dan prospek perekonomian Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2025 yang diantaranya mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Perubahan pada laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah berimplikasi pada besaran pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah serta besaran pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Biak Numfor tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang memiliki tema “ Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Selain itu, kebijakan perekonomian Kabupaten Biak Numfor juga Meperkuat Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Demi Terwujudnya Biak Numfor Yang Mandiri dan Sejahtera

Kebijakan perekonomian Kabupaten Biak Numfor bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian Kabupaten Biak Numfor tahun 2025 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, regional dan nasional tahun sebelumnya.

3.1.1 Perekonomian Global

Perekonomian global pada tahun 2023 diprediksi melambat menjadi 3,0 persen dibanding tahun 2022 yang mencapai 3,5 persen. Proyeksi perlambatan ini

berlanjut hingga tahun 2024, dengan pertumbuhan sekitar 2,9 persen. Beberapa faktor penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi global antara lain; pertama, perang Rusia dan Ukraina belum dapat diprediksi kapan akan berakhir meskipun ada kecenderungan penurunan tensi konflik. Kedua, negara utama seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa menghadapi tekanan permintaan domestik. Ketiga, pengetatan moneter yang dimulai pada Januari 2022 saat ini sudah meluas. Oleh karena itu, walaupun tekanan pada 2023 menurun, tingginya ketidakpastian masih mengiringi.

Amerika Serikat dihadapkan pada persoalan inflasi yang masih tinggi, potensi berkurangnya penciptaan lapangan kerja, dan tingginya tingkat suku bunga perbankan. Meskipun inflasi di Amerika Serikat lambat laun sudah menunjukkan penurunan, tingkat harga masih relatif tinggi. Tingkat inflasi saat ini masih di level 6 persen setelah sebelumnya sempat menyentuh 9 persen, sementara target inflasi yang ingin dicapai adalah di kisaran 2 persen. Oleh karenanya, *The Fed* diprediksi masih akan terus menaikkan suku bunga sampai target inflasi tercapai, sehingga berdampak pada perlambatan atau tidak menutup kemungkinan kontraksi ekonomi. Sementara itu, lapangan kerja yang tercipta lebih banyak disebabkan oleh kembali bergerak bisnis di sektor jasa yang sempat kontraksi dalam akibat pandemi COVID-19, bukan karena adanya ekspansi bisnis atau lonjakan permintaan secara agregat.

Negara-negara Eropa masih menghadapi persoalan kurangnya pasokan energi dan kenaikan harga energi akibat perang Rusia-Ukraina. Situasi ini mengerek inflasi yang berdampak pada tertekannya konsumsi masyarakat dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Eropa, Tiongkok yang permintaan domestiknya mengalami perlambatan bahkan sempat berkontraksi akibat penerapan *zero covid policy* pada tahun ini, diprediksi membaik pada 2023.

Tingginya inflasi Amerika Serikat yang mendorong *The Fed* mengambil langkah agresif menaikkan *Federal Fund Rate* (FFR) berdampak pada penguatan Dollar terhadap mata uang lainnya di dunia. Faktor ini pula yang mendorong sejumlah bank sentral negara lainnya juga melakukan pengetatan moneter untuk meredam inflasi.

Pada tahun 2023, tingkat inflasi global diperkirakan relatif lebih rendah sebagai dampak pelemahan permintaan dan peningkatan suku bunga. Pelemahan



- f. Mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun realiasi belanja APBD dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3. 10
Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2022-2026

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 *	Proyeksi/ Target Tahun 2025	Proyeksi/ Target Tahun 2026
5.1	BELANJA OPERASI	1,010,282,648,594.48	1,029,495,177,403.89	232,162,606,914.00	1,052,798,121,929.56	1,067,585,366,923.48
5.1.1	Belanja Pegawai	373,107,100,365.00	431,843,584,157.01	147,989,200,995.00	377,224,545,799.82	378,607,100,365.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	578,716,286,270.48	506,665,766,512.88	49,516,720,362.00	615,825,203,403.84	628,716,286,270.48
5.1.3	Belanja Bunga	2,153,281,671.00	2,080,595,223.00	580,685,557.00	1,956,000,000.00	1,956,000,000.00
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	48,701,520,288.00	79,095,191,511.00	34,000,000,000.00	49,449,611,578.34	49,701,520,288.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7,604,460,000.00	9,810,040,000.00	76,000,000.00	8,342,761,147.58	8,604,460,000.00
5.2	BELANJA MODAL	155,650,647,918.00	219,484,323,441.00	7,035,028,951.00	156,691,588,687.33	157,050,647,918.00
5.2.1	Belanja Modal-Tanah	6,313,876,700.00	1,950,000,000.00	5,000,000,000.00	6,238,727,228.84	6,213,876,700.00
5.2.2	Belanja Modal-Peralatan dan Mesin	45,438,527,231.00	65,003,742,758.00	295,502,370.00	45,138,195,897.78	45,038,527,231.00
5.2.3	Belanja Modal-Gedung dan Bangunan	64,201,010,363.00	78,385,346,781.00	1,739,526,581.00	64,575,646,487.13	64,701,010,363.00



No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 *	Proyeksi/ Target Tahun 2025	Proyeksi/ Target Tahun 2026
5.2.4	Belanja Modal- Jalan, Irigasi dan Jaringan	37,240,066,624.00	69,095,292,048.00	-	37,987,576,922.89	38,240,066,624.00
5.2.5	Belanja Modal- Aset Tetap Lainnya	2,457,167,000.00	2,900,941,854.00	-	2,751,442,159.69	2,857,167,000.00
5.2.6	Belanja Modal- Aset Lainnya		150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	4,072,013,000.00	3,778,098,000.00	750,600,000.00	3,690,940,651.84	3,572,013,000.00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	4,072,013,000.00	3,778,098,000.00	750,600,000.00	3,690,940,651.84	3,572,013,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	236,125,804,240.00	229,842,116,000.00	15,219,291,250.00	236,875,407,904.82	237,125,804,240.00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	236,125,804,240.00	229,842,116,000.00	15,219,291,250.00	236,875,407,904.82	237,125,804,240.00
5	BELANJA DAERAH	1,406,131,113,752.48	1,482,599,714,844.89	255,167,527,115.00	1,450,056,059,173.55	1,465,333,832,081.48

(Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor; RPD Kab. Biak Numfor Tahun 2024-2026, data diolah)

(*) : Realisasi per Mei 2024

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2025 antara lain diarahkan untuk:

- a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu;
- b. Membentuk dana cadangan yang akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya strategis, misalnya belanja Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), dan dana cadangan bencana alam; dan
- c. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*).

Adapun realiasi dan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3. 11
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kab. Biak Numfor Tahun 2022-2026

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024 *	Proyeksi/ Target Tahun 2025	Proyeksi/ Target Tahun 2026
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	51,062,286,225.49		-	51,806,595,881.99	52,062,286,225.49
6.1.1	Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	16,062,286,225.49		-	16,806,595,881.99	17,062,286,226.49
6.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	35,000,000,000.00		-	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35,570,000,000.00		23,333,333,334.00	35,573,745,903.11	35,575,000,000.00
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	570,000,000.00		-	573,745,903.11	575,000,000.00
6.2.5	Pembayaran Pokok Pinjman Dalam Negeri	35,000,000,000.00		23,333,333,334.00	35,000,000,000.00	35,000,000,000.00
6	PEMBIAYAAN	15,492,286,225.49	-	(23,333,333,334.00)	16,232,849,978.88	16,487,286,225.49

(Sumber: BPKAD Kab. Biak Numfor; RPD Kab. Biak Numfor Tahun 2024-2026, data diolah)

(*) : Realisasi per Mei 2024

3.2.4 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Gambaran kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2025
1	Pendapatan	1,494,252,358,857.39
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	6,529,045,771.06
	Total Penerimaan	1,500,781,404,628.45
	<i>Dikurangi:</i>	
4	Belanja Operasi	528,566,697,000.00
	<i>Belanja Pegawai</i>	<i>377,224,545,799.82</i>
	<i>Belanja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>151,342,151,200.18</i>
5	Pengeluaran Pembiayaan	35,573,745,903.11
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	936,640,961,725.34

(Sumber: RPD Kab. Biak Numfor Tahun 2024-2026, data diolah)

3.2.5 Kerangka Kebijakan dan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Papua

Gambaran pengalokasian dana Otonomi Khusus Papua di Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2025 digambarkan sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3. 13

Kerangka Pengalokasian Sumber Dana OTSUS Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025

No	OPD Pengelola	Pagu																Jumlah Per OPD	Persentase Total OPD
		PENERIMAAN BERBASIS KINERJA (SG 1.25%)				PENERIMAAN UMUM (BG 1%)								DTI (Dana Tambahan Infrastruktur)					
		Dana Penerimaan Berbasis Kinerja - Bidang Pendidikan	Dana Penerimaan Berbasis Kinerja - Bidang Kesehatan	Dana Penerimaan Berbasis Kinerja - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	%	Dana Penerimaan Umum - Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Pelayanan Publik	%	Dana Penerimaan Umum - Peningkatan Kesejahteraan OAP dan Penguatan Lembaga Adat	%	Dana Penerimaan Umum - Kebutuhan dan Prioritas Daerah	%	Persentase % Keseluruhan	DTI (Infrastruktur Perhubungan)	%	DTI (Air Bersih)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
A	BIDANG PENDIDIKAN	27,669,800,000			36.53							-							
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26,819,800,000			35.41												26,819,800,000	24.10	
	Urusan Kebudayaan				-												-		
2	SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)	850,000,000			1.12												850,000,000	0.53	
B	BIDANG KESEHATAN		21,216,525,000		28.01														
3	Dinas Kesehatan		8,216,525,000		10.85												8,216,525,000	5.11	
4	RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah)		13,000,000,000		17.16							-					13,000,000,000	8.08	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											-	8,806,250,000	60.92	1,000,000,000	6.92	9,806,250,000	6.10	
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman					1,641,200,000				2,100,000,000		2.32	-	-	-	2.97	3,741,200,000	4.35	
7	Dinas Sosial							1,700,000,000				2.41	-	-	-		1,700,000,000	1.74	
8	Usulan Disnaker							1,000,000,000				1.42					1,000,000,000	0.12	
9	Loka Latihan Kerja dan UKM							1,000,000,000				1.42					1,000,000,000	0.62	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana					2,100,000,000						2.97					2,100,000,000	1.37	
11	Dinas Catatan Sipil									2,500,000,000		3.54					2,500,000,000	0.93	
12	BPMK							1,150,000,000				1.63					1,150,000,000	0.44	
13	Dinas Perhubungan					-				4,050,000,000		5.73	4,650,000,000	32.17			8,700,000,000	4.34	
14	Dinas Informasi dan Komunikasi									750,000,000		1.06					750,000,000	0.47	
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)									3,000,000,000		4.25							
16	Inspektorat									1,500,000,000		2.12					3,000,000,000	1.31	
17	Bagian Kesejahteraan Rakyat (SETDA)									29,479,408,000		41.71					1,500,000,000	0.93	
18	Bagian Arsip dan									500,000,000		0.71					29,479,408,000	12.43	
																	500,000,000	0.31	



No	OPD Pengelola	Pagu														Jumlah Per OPD	Persentase Total OPD	
		PENERIMAAN BERBASIS KINERJA (SG 1.25%)				PENERIMAAN UMUM (BG 1%)						DTI (Dana Tambahan Infrastruktur)						
		Dana Penerimaan Berbasis Kinerja - Bidang Pendidikan	Dana Penerimaan Berbasis Kinerja - Bidang Kesehatan	Dana Penerimaan Berbasis Kinerja - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	%	Dana Penerimaan Umum - Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pelaksanaan Pelayanan Publik	%	Dana Penerimaan Umum - Peningkatan Kesejahteraan OAP dan Penguatan Lembaga Adat	%	Dana Penerimaan Umum - Kebutuhan dan Prioritas Daerah	%	Persentase % Keseluruhan	DTI (Infrastruktur Perhubungan)	%	DTI (Air Bersih)			%
	perpustakaan daerah (SETDA)																	
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)									1,000,000,000		1.42					1,000,000,000	0.16
20	Brida									200,000,000							200,000,000	0.16
C	BIDANG EKONOMI KERAKYATAN			26,857,883,000	35.46					-								
20	Dinas Koperasi dan UKM			14,857,883,000	19.62					-		-					14,857,883,000	11.62
21	Dinas Perikanan			2,000,000,000	2.64												2,000,000,000	1.24
22	Dinas Pariwisata							11,000,000,000				15.57					11,000,000,000	4.04
23	Dinas Pertanian Tanaman Pangan			9,750,000,000	12.87							-					9,750,000,000	6.06
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			250,000,000	0.33			3,650,000,000		350,000,000		5.16	-	0			4,250,000,000	0.78
25	KESBANGPOL					500,000,000						0.71					500,000,000	1.86
26	Pemuda dan Olahraga					1,500,000,000						2.12					1,500,000,000	0.95
	JUMLAH PER JENIS DAN BIDANG	27,669,800,000	21,216,525,000	26,857,883,000	100.00	5,741,200,000	8.12	19,500,000,000	27.59	45,429,408,000	64.28	100.00	13,456,250,000	93.58	1,000,000,000	9.89	160,871,066,000	100.00
	TOTAL PER JENIS PENERIMAAN	75,744,208,000				70,670,608,000							14,456,250,000					
	TKD 2025 OTSUS	75,744,208,000			47.08	70,670,608,000						43.93	14,456,250,000			8.99		
	SELISIH PAGU PENYESUAIAN	-				-							-					
	TOTAL PAGU USULAN DAERAH 2025	160,871,066,000																
	TOTAL PAGU OTSUS 2025	160,871,066,000																

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

"Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah, terdiri dari program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan prioritas pembangunan lainnya sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Biak Numfor"



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2025 dirumuskan sebagai dokumen operasional tahunan dari penjabaran RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai target dan sasaran penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dalam RKP, Rancangan RKPD Provinsi Papua tahun 2025. Penyusunan Bab ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2025 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Tema RKP 2025 dan 8 sasaran Prioritas;
2. Sasaran pokok arah kebijakan yang tertuang didalam RPD 2024-2026;
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional maupun provinsi;
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2025.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Biak Numfor tahun 2025 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).



No	Prioritas Tahun 2025	Sasaran	Target
	Penguatan Potensial Sumber Daya Alam	Menguatnya Industri dan Perdagangan yang Berdaya Saing	4,41
2	Peningkatan Mutu SDM Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mutu Penyelenggaraan Pendidik	14,37
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	68,8
		Meningkatnya Partisipasi Dan Daya Saing Pemuda Dan Perempuan Dalam Pembangunan	100
		Berkurangnya Penduduk Miskin Rawan Sosial Dan Pengendalian Penduduk	23,87
		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Dan Partisipasi Politik Masyarakat	57,45
3	Percepatan, Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Kepariwisata dan Perikanan Menuju Iven Wisata Daerah dan Nasional	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	70
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat	79,76
		Meningkatnya Penyelenggaraan Transportasi	65
		Meningkatnya Kualitas Layanan Jaringan Telekomunikasi Dan Informatika	90
		Meningkatnya Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat	Rendah
		Meningkatnya Produksi Perikanan	15,59
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Dan Promosi Wisata	6
4	Pemantapan Sumber Daya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel Menuju <i>e-goverment</i>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Melayani	WTP

Selanjutnya akan disajikan persandingan prioritas Kabupaten Biak Numfor dengan prioritas nasional, dan Provinsi Papua dengan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada. Berikut tabel persandingan prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Papua dan Kabupaten Biak Numfor, disajikan pada tabel dibawah ini. Sedangkan jika disandingkan dengan tema RKP Nasional, Provinsi dan Kabupaten Biak Numfor adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 3
Keterkaitan Tema dan Prioritan Pembangunan Nasional, Provinsi Papua, dan Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025

Tema/ Prioritas Pembangunan		
Nasional	Provinsi	Kabupaten
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif sebagai Modal Dasar Transformasi Pembangunan Papua	Meperkuat Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Demi Terwujudnya Biak Numfor Yang Mandiri dan Sejahtera
Prioritas Pembangunan		
1. Memeperkokoh Idiologi Pancasila, dan hak Asasi Manusia 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru 3. Melanjutkan Pengembanagn Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Indiiustri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga Kesetaraan Gender, Serta	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan SDM Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	1. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Skala Kecil dan Menengah Melalui Penguatan Potensial Sumber Daya Alam 2. Penguatan Mutu SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3. Percepatan, Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Keparawisataan dan Perikanan Melalui Iven wisata daerah dan Nasional 4. Penguatan Sumber Daya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel menuju egovernment



Tema/ Prioritas Pembangunan		
Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas. 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		

Tabel 4. 4
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, dan hak Asasi Manusia	4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	4. Penguatan Sumber Daya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel menuju e government	Menciptakan suasana aman, nyaman, rukun dan damai	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Kesbang Linmas
			Penguatan peran penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kesbang Linmas
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	2. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	1. Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Skala Kecil dan Menengah Melalui Penguatan Potensial Sumber Daya Alam	Pendampingan budidaya perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya	Perikanan
			Pendampingan kelompok nelayan	Program pengelolaan perikanan budidaya	Perikanan
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong	2. Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan	3. Percepatan, Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Kepariwisata dan Perikanan Melalui Iven	Pengawasan dan perlindungan sumber-sumber mata air (area perkotaan)	Program perencanaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup



Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Fokus Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
			bangunan gedung	bangunan gedung	
			Menciptakan suasana aman, nyaman, rukun dan damai	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Kesbang Linmas
			Pemantapan Tribina Keluarga	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Kesbang Linmas

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

"Mengemukakan secara eksplisit rencana program prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD"



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAN

5.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah

RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 merupakan dokumen rencana tahunan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan menengah daerah, arah kebijakan dalam RPD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Rencana Kerja Tahunan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat. Berikut Pagu Indikatif Perangkat Daerah dalam RKPD.

Tabel 5. 1
Rekapitulasi Anggaran Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Biak Numfor Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	380.185.529.297,00
2	Sanggar Kegiatan Belajar	2.084.393.316,00
3	Dinas Kesehatan	130.591.324.545,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	133.408.862.716,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	75.553.490.500,00
6	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman	18.073.138.300,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	8.755.730.938,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.059.615.000,00
9	Dinas Sosial	6.809.210.600,00
10	Dinas Tenaga Kerja	4.389.666.500,00
11	Lokal Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah	2.895.233.400,00



No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	15.145.432.860,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	20.971.533.041,00
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.066.465.080,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	8.426.967.406,00
16	Dinas Perhubungan	27.629.266.500,00
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.883.146.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	18.056.654.000,00
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.633.262.973,00
20	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	7.487.660.360,00
21	Dinas Perikanan	19.038.870.000,00
22	Dinas Pariwisata	28.287.030.455,00
23	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	27.568.787.847,00
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	16.624.239.500,00
25	Sekretariat Daerah	84.918.910.232,00
26	Sekretariat Dewan	56.136.652.482,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.390.019.000,00
28	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	290.216.287.422,00
29	Badan Pendapatan Daerah	8.927.041.472,00
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.911.064.432,00
31	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	860.000.000,00
32	Inspektorat	9.236.441.757,00
33	Distrik Biak Kota	12.170.000.000,00
34	Distrik Samofa	10.876.125.000,00
35	Distrik Yendidori	3.234.954.968,00
36	Distrik Biak Timur	2.948.610.000,00
37	Distrik Padaido	2.068.849.750,00
38	Distrik Biak Utara	2.508.755.000,00
39	Distrik Warsa	2.132.527.150,00



No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
40	Distrik Biak Barat	2.352.862.000,00
41	Distrik Numfor Barat	1.946.193.500,00
42	Distrik Numfor Timor	1.743.887.500,00
43	Distrik Bondifuar	1.734.008.500,00
44	Distrik Yawosi	2.035.824.320,00
45	Distrik Andei	2.227.395.000,00
46	Distrik Swandiwe	2.052.874.000,00
47	Distrik Bruyadori	1.596.386.000,00
48	Distrik Orkeri	1.782.971.400,00
49	Distrik Poiru	1.648.162.500,00
50	Distrik Aimando	1.873.260.000,00
51	Distrik Oridek	2.830.149.500,00
52	Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	5.308.190.076,00
Jumlah		1.517.293.914.095,00

Pagu Anggaran berdasarkan Perangkat tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. dan Kerangka Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-588 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana lampiran.

5.2 Penganggaran Dana Otonomi Khusus

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 2021, merupakan upaya pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan

pembangunan di wilayah Papua, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, maka kebijakan pengalokasian dana otonomi khusus telah diubah dimana pengalokasian diatur langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sehingga semua proses penyusunan usulan program dan kegiatan, realisasi anggaran sampai dengan laporan disampaikan secara langsung ke DJPK. Selanjutnya pengalokasian dana Otsus Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut.

Tabel 5. 2
Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Kab. Biak Numfor Tahun 2025

No	Bidang	OPD	Pagu (Rp.)
1	Spesific Grant (1,25%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.819.800.000
		SKB	850.000.000
		Dinas Kesehatan	8.216.525.000
		Rumah Sakit Umum Daerah	13.000.000.000
		Dinas Koperasi dan UKM	14.857.883.000
		Dinas Perikanan	2.000.000.000
		Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	9.750.000.000
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	250.000.000
		Jumlah Spesific Grant	75.744.208.000
2	Block Grant (1%)	Dinas Perumahan dan Permukiman	3.741.200.000
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.806.250.000
		Dinas Perhubungan	2.750.000.000
		Dinas Sosial	1.700.000.000
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.500.000.000
		Dinas Tenaga Kerja	1.000.000.000
		Loka Latihan Kerja dan UKM	1.000.000.000
		DP3AKB	2.100.000.000
		Dinas Pariwisata	11.000.000.000



No	Bidang	OPD	Pagu (Rp.)
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.000.000.000
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	1.550.000.000
		Badan Kesbangpol	500.000.000
		Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.500.000.000
		Inspektorat	1.500.000.000
		BAPPEDA	2.100.000.000
		Bagian Kesejahteraan Rakyat (SETDA)	30.079.408.000
		Bagian Arsip dan Perpustakaan Daerah (SETDA)	500.000.000
		Dinas Infokom	750.000.000
		BPKAD	250.000.000
		BRIDA	200.000.000
Jumlah Block Grant			70.670.608.000
3	Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.456.250.000
		Dinas Perhubungan	8.700.000.000
		Total Infrastruktur (DTI)	9.806.250.000
Jumlah DTI			32.662.500.000
Total Usulan			160.871.066.000

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

"Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir perencanaan."



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 sebagai perencanaan tahunan strategis merumuskan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun kedua RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran serta program prioritas.

Tabel 6. 1
Indikator Makro Pembangunan/ Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3 - 5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,5 - 5,0
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,0 - 8,0
4	Nilai Tukar Petani	Kumulatif	113 - 115
5	Rasio Gini	Nilai	0,379 - 0,382
6	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,56
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	38,6
8	Nilai Tukar Nelayan	Kumulatif	104 - 105

(Sumber: Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025)

Dalam konteks pencapaian program maka indikator kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara *lagging indicators* dan *leading indicators*. *Lagging indicators* adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun *leading indicators* adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (*outcome measures*) bagi indikator kinerja dari perspektif yang ada dibawahnya (*performance drivers*). Adapun ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Biak Numfor, sebagai berikut.

**Tabel 6. 2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci**

No	Indikator Sasaran	Satuan Indikator	Kinerja Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Tahun 2025	Kinerja Akhir Periode RPD (2026)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,85	73,39	73,57
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.53	10,86	10,97
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,21	14,43	14,43
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,5	68,8	68,9
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,47	74.86	76,91
6	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,25	90,25	90,61
7	Persentase Penduduk Miskin	Persen	24,45	23.87	23,69
8	Gini Rasio	Indeks	0,374	0,366	0,364
9	Total Fertility Rate	Per 1000 Perempuan	30	20	15
10	Indeks Demokrasi	Indeks	51,35	57,45	60,5
11	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,98	5,04	5,06
12	PDRB Per Kapita	Rp.	59.576.217	63.222.758	64.487.213
13	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	4	6	7
14	Laju Inflasi	Persen	5,68	0,79	0,41
15	Indeks Infrastruktur wilayah	Indeks	2,53	2,62	2,64
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	79,05	79,76	80
17	Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko	Sedang	Rendah	Rendah
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	51,94	58,26	61,71



Tabel 6. 3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kab. Biak Numfor

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Laju Inflasi	Persen	5,68	2,94	1,52	0,79	0,41	0,41
1.2	PDRB Per Kapita	Rupiah	59.576.217	60.767.741	61.983.096	63.222.758	64.487.213	64.487.213
1.3	Gini Rasio	Indeks	0,374	0,371	0,369	0,366	0,364	0,364
1.4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	24,45	24,26	24,06	23,87	23,69	23,69
1.5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,85	73,03	73,21	73,39	73,57	73,57
1.6	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,53	10,64	10,75	10,86	10,97	10,97
1.7	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,5	68,6	68,7	68,8	68,9	68,9
1.9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,47	71,26	73,1	74,98	76,91	76,91
1.10	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan	Persen	6,61	6,58	6,59	6,6	6,61	6,61
1.11	Opini BPK	Disclaimer/ WDP / WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.12	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	69,4	69,4	70,8	72,2	73,6	73,6



Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.13	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Rupiah	4,05	3,99	3,9	4,43	4,37	4,37
1.14	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Rupiah	0,82	0,84	0,84	0,79	0,88	0,88
1.15	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Rupiah	15,07	14,56	14,21	14,85	15,39	15,39
1.16	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Rupiah	17,77	17,96	18,35	18,52	18,17	18,17
1.17	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Rupiah	3,77	3,73	3,68	4,15	4,16	4,16
1.18	Indeks Demokrasi	Persen	51,35	51,35	54,4	57,45	60,5	60,5
1.19	Indeks Pembangunan Gender	Persen	90,25	90,34	90,43	90,52	90,61	90,61
1.20	Nilai AKIP	Nilai/ Predikat	CC	C	B	B	BB	BB
1.22	Persentase Konsistensi RKPD terhadap RPJMD (RPD)	Persen	60	65	70	75	80	80
ASPEK KESEJAHTERAAN SOSIAL								
1. Pendidikan								
1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,21	14,26	14,32	14,43	14,3	14,8
2. Kesehatan								
2.1	Total Fertility Rate (TFR)	Per 1.000 perempuan	30	28	25	20	15	15
3. Pangan								



Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	69,4	69,4	70,8	72,2	73,6	73,6
4. Ketenagakerjaan								
4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	69,47	71,26	73,1	74,98	76,91	76,91
5. Pemberdayaan								
5.3	Presentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	Persen	68	42	83	75	75	75
6. Seni Budaya, Olahraga dan Pemuda								
6.1	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	50	50	70	90	100	100
6.2	Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan	Persen	48	48	61	74	87	87
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Kemampuan Ekonomi Daerah								
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	100,66	101	101	102	103	103
1.2	Net Ekspor Perdagangan dalam dan Luar Negeri	Rupiah	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
1.3	Pendapatan Per Kapita penduduk	Rupiah	26,13	26,9	27,24	28,62	30	30



Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4	Rasio Gini	Indeks	0,374	0,371	0,369	0,366	0,364	0,364
1.5	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Persen	4,05	3,99	3,9	4,43	4,37	4,37
1.6	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	17,77	17,96	18,35	18,52	18,17	18,17
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1. Perhubungan								
1.1	Presentase ketersediaan fasilitas pelabuhan penyeberangan dengan sarana prasarana perhubungan laut	Persen	52	58	64	70	76	76
1.2	Ketersediaan sarana perhubungan udara dalam menunjang peningkatan Status bandara	Trayek	72	85	90	90	90	90
2. Listrik Dan Air Bersih								
2,1	Cakupan ketersediaan air minum	Persen	50	55	60	65	70	70
3. Lingkungan Hidup								
3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,76	82,84	79,29	79,52	79,76	79,76
3.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,89	95,23	94,76	95,26	95,31	95,31



Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.3	Indeks Resiko Bencana	Kelas Resiko	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah
3.4	Presentase pemantauan kualitas air	Persen	40	50	60	70	80	80
4. Informasi dan Komunikasi								
4.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	NA	40	45	50	60	60
Iklim Berinvestasi								
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Persentase potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	60	70	80	90	100	100
1.2	Jumlah event yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Persen	NA	12	12	12	12	12
ASPEK PELAYANAN UMUM								
1.	Layanan Urusan Wajib Dasar							
1.1.	Pendidikan							
1.1.1	Angka Partisipasi kasar PAUD	Persen	21,97	23,04	24,17	25,35	26,59	26,59
1.1.2	Angka Partisipasi kasar SD	Persen	108,44	109,5	111,04	112,6	114,18	114,18
1.1.3	Cakupan replikasi Baca Tulis kelas awal siswa SD	Persen	33,3	33,8	34,3	34,8	35,3	35,3
1.1.4	Angka Partisipasi kasar SMP	Persen	89,24	95,65	97,71	99,81	101,95	101,95



Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.5	Angka Partisipasi kasar SMA/SMK	Persen	107,54	102,05	103,05	104,07	105,09	105,09
1.1.9	Cakupan pemenuhan SPM Pendidikan	Persen	60	70	80	90	100	100
1.1.9	Presentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	37,88	38,11	39,14	40,43	41,22	41,22
1.1.6	Rasio Guru dan Murid SD	Persen	01:21,4	01:21,5	01:21,6	01:21,7	01:21,8	01:21,8
1.1.7	Rasio Guru dan Murid SMP	Persen	01:24,5	01:29,4	01:34,3	01:39,2	01:44,1	01:44,1
1.1.8	Presentase Guru yang memiliki Ijazah S-1	Persen	65,21	66,36	69,77	73,18	76,59	76,59
1.2.	Kesehatan							
1.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000	2,3	3	2	1	1	1
1.2.2	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000	170	160	150	140	130	130
1.2.3	Rasio tenaga kesehatan sesuai standar SDM	Persen	61,9	65	70	85	95	95
1.2.4	Cakupan UCI	Persen	66	75	80	85	90	90
1.2.5	Angka Kejadian Malaria (Kasus Lokal)	Persen	9,95	7,93	3,09	1,21	0,47	0,47
1.2.6	Prevalensi HIV	Persen	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
1.2.7	Angka Kesakitan	Persen	87,8	15	14,5	14	13	5,8
1.2.8	Prevalensi Stunting	Persen	5,57	7	6	5	4	4



Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2.10	Cakupan posyandu buat lansia	Persen	70	75	80	85	90	90
1.2.11	Persentase sarana/ prasarana kesehatan yang memenuhi standar	Persen	70	75	80	85	90	90
1.2.12	Persentase Pengawasan bahan pangan berbahaya obat dan makanan	Persen	70	75	80	85	90	90
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.3.1	Pekerjaan Umum							
1.3.1.2	Presentase jalan yang memiliki drainase dalam kondisi baik	Persen	30	35	40	45	50	50
1.3.1.3	Presentase penambahan jalan dalam kondisi baik	Persen	162,21	187,21	212,21	237,21	262,21	262,21
1.3.1.4	Akses sanitasi yang layak	Persen	80	83	86	89	92	92
1.3.1.5	Cakupan ketersediaan air minum	Persen	50	55	60	65	70	70
1.3.1.8	Cakupan bangunan pengaman pantai dan pelindung ruang publik	Persen	35	35	40	45	50	50
1.3.2	Penataan Ruang							
1.3.2.1	Cakupan Rasio pelayanan pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung yang layak	Persen	55	60	65	70	75	75



Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2	Indeks Kualitas Udara	Persen	94,66	94,71	94,76	95,26	95,31	95,31
2.3.3	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persen	30	30	35	40	45	50
2.3.4	Persentase sampah yang terkelola	Persen	73	72	71	70	70	70
2.4.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
2.4.1	Rasio penduduk Ber KTP	Persen	66,32	73,06	79,79	86,53	93,26	93,26
2.4.2	Cakupan penerbitan KTP elektronik	Persen	90	95	95,1	95,12	95,13	95,13
2.4.3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	87,5	88	88,05	88,1	88,13	88,13
2.5.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.5.1	Indeks Desa Membangun	Persen	0,5719	0,5719	0,5801	0,5885	0,5969	0,5969
2.5.2	Presentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung yang tertib	Persen	55	60	65	70	75	75
2.5.3	Presentase kampung yang memiliki kelembagaan adat yang aktif	Persen	65	70	75	80	85	85
2.6.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							



Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD		Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.6.1	Presentase tindak lanjut LHP	Persen	42,05	49,64	57,23	64,82	72,41	72,41
4.7	Administrasi Pemerintahan							
4.7.1	Penyusunan LKIP Tepat Waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4.7.2	Nilai LPPD	Tinggi/ Sedang/ Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4.7.3	Jumlah produk hukum daerah yang di tetapkan	Jumlah	5	9	13	17	21	21
4.8.	Sekretariat Dewan							
4.8.1	Jumlah Perda yang dihasilkan	Perda	7	7	7	7	7	28
4.8.2	Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	Persen	60	65	70	75	80	80

BAB VII

PENUTUP

"Menjelaskan bagaimana RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan tematik yang selaraskan terhadap tema nasional maupun Provinsi Papua yaitu Memperkuat Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Demi Terwujudnya Biak Numfor Yang Mandiri dan Sejahtera."



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 melandasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, selain itu secara substansial prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 menyelaraskan dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023-2043, berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan pada lingkup lokal, nasional, hingga global.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Biak Numfor dilakukan secara sistematis, terpadu dan terarah serta tanggap terhadap perubahan, yang penyusunannya dilakukan untuk mewujudkan sinergitas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunnn serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya alam dalam pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 adalah dokumen operasional dari RPD 2024-2026 dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan tematik yang selaras terhadap tema nasional maupun Provinsi Papua yaitu **Memperkuat Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Demi Terwujudnya Biak Numfor Yang Mandiri dan Sejahtera**. Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasarkan pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan.

Dokumen RKPD digunakan sebagai dasar dalam pengendalian pembangunan jangka menengah dalam RPD dan jangka tahunan (untuk 2025). Dokumen ini juga sebagai dasar bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkepentingan dalam memantau pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh Kabupaten Biak Numfor tahun 2025.

Dengan demikian akan terwujud dokumen perencanaan yang konsisten dan saling berkaitan serta mensejahterakan masyarakat. Keberhasilan implementasi pelasaksanaan RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten



Biak Numfor mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025 ini dengan sebaik- baiknya demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Biak Numfor.



BURUNG CEKAKAK-PITA NUMFOR (TANYIPTERA CAROLINAE)

SELAYANG PANDANG BURUNG ENDEMIK BIAK

CEKAKAK-PITA NUMFOR (TANYIPTERA CAROLINAE) ATAU SERING DISEBUT "BURUNG NAMPISASO" OLEH NASYARAKAT LOKAL DI BIAK NUMFOR ADALAH SALAH SATU JENIS BURUNG CEKAKAK YANG MASUK DALAM KELUARGA ALCEDINIDAE. JENIS INI MERUPAKAN SATU-SATUNYA CEKAKAK PITA YANG ADA DI PULAU NUMFOR.

BURUNG CEKAKAK-PITA NUMFOR MEMPUNYAI CUKUP EKOR YANG CUKUP PANJANG. BURUNG DEWASA BERUKURAN SENTAR 34 HINGGA 38 CM (13 HINGGA 15 INCI) SAMPAI DENGAN UJUNG BULU EKORNYA. CIRI-CIRI DARI BURUNG INI ADALAH MEMILIKI BAGIAN ATAS BERNYAWA BIRU KEUNGUAN DAN BAGIAN BAWAH BERNYAWA SERUPA DENGAN PUMGUNG BAWAH, PANTAT, DAERAH PERUT, DAN EKOR BERNYAWA PUTIH. IRISNYA BERNYAWA COKELAT, PARUHNYA BERNYAWA MERAH, DAN TUNGKAI SERTA KAKINYA BERNYAWA COKELAT KEHJAUAN. BURUNG MUDA MEMILIKI BULU UNGU-BIRU KUSAM DENGAN BAGIAN BAWAH BERNYAWA MERAH KARAT DAN KREM, PANTAT BERNYAWA PUTIH, DAN EKOR BERNYAWA KEHITAMAN. BURUNG BETINA SERUPA DENGAN BURUNG JANTAN.

BURUNG CEKAKAK-PITA NUMFOR HANYA DITEMUKAN DI PULAU NUMFOR, SEBUAH PULAU SELUAS 335 KM² (129 MIL PERSEGI) DI GUGUSAN PULAU BIAK DI LEPAS PANTAI BARAT LAUT PROVINSI PAPUA, INDONESIA. HABITAT KHASNYA ADALAH HUTAN, HUTAN RINGAN, LAHAN PERTANIAN, DAN VEGETASI PESISIR. TAMPAKNYA BURUNG-BURUNG INI BERASAL DARI BEBERAPA BURUNG T. GALATEA PENDIRI YANG TIBA DI PULAU ITU DAN MENJADI TERISOLASI DARI BURUNG-BURUNG DARATAN. MEREKA KEMUDIAN MENGALAMI "REVOLUSI GENETIK". TIDAK ADA FAKTOR BIOTIK TERTENTU YANG TERLIBAT, TETAPI ADA VARIASI YANG CUKUP DI ANTARA BURUNG-BURUNG PENDIRI UNTUK MENDORONG SPESIASI, DAN BERMACAM-MACAM GEN YANG DITERIMA BURUNG-BURUNG ITU KEMUDIAN TIDAK TERGANGGU OLEH MASUKNYA GEN ASING LEBIH LANJUT.



<https://bappeda.biakkab.go.id>



@bappedabiak22



+6281299165164

bappedabiak



@bappedabiak

